

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bagir Manan, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung.
- , 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Didik Sukriono, 2013, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi Daerah, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Setara Press, Malang.
- Hans Kelsen, 2010, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.
- Hamzah, 2008, *Hubungan Eksekutif Dengan Legislatif Daerah Dan implikasi Hukumnya*, Pascasarjana UNHAS, Makasar.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- J.J.H Bruggink, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, (alih bahasa Arief Sidarta), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, 2016, *Dasar-dasar Filasafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maria Farida Indriati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- , 2007, *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Munir Fuady, 2014, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenamedia Grup, Jakarta.

Rozali Abdullah, S. H. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Buku Kedua, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. RajaGrafindo, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sjachran Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi*, Alumni, Bandung.

Sirajuddin Dkk, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

-----, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta.

Tjondronrumulla, S.H.,C.N.,M.H, 2016, *Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Universitas Surabaya, Surabaya.

Widarta, 2001, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.

Jurnal

Jimly Asshiddiqie, *Jurnal Penegakan Hukum*, www.Jimly.com.

-----, 2010, *Konstitusi*, Jakarta, Kompas.

Juanda, 2004, *Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah menurut UUD 1945*. Disertasi Pascasarjana Unpad, Bandung.

Wicipto Setiadi, 2018, *Penegakan Hukum: Kontribusinya bagi pendidikan hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Majalah Hukum Nasional Nomor . Vol. 48 No. 2 (2018)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit.

Website

<https://covid19.go.id/>

<https://sumbar.antaranews.com/berita/479853/satpol-pp-payakumbuh-naikkan-18-pelanggar-perda-ke-persidangan>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022

<https://www.harianhaluan.com/news/pr-102709267/tak-bermasker-tim-yustisi-padang-panjang-jaring-35-pelanggar-prokes>, diakses tanggal 2 Maret 2022

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200911180024-4-186241/sri-mulyani-bicara-dampak-psbb-luar-biasa-serius>, diakses tanggal 22 September 2022

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/26442/ketika-semua-harus-memulai-fase-new-normal/0/artikel>, diakses tanggal 22 September 2022.

[.hantaran.co/satpol-pp-kota-payakumbuh-terbaik-se-sumbar -penegakan-prokes/](https://www.hantaran.co/satpol-pp-kota-payakumbuh-terbaik-se-sumbar-penegakan-prokes/), diakses 1 Oktober 2022

<https://www.promkes.kemkes.go.id>, diakses pada tanggal 30 Desember 2022.